

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN MAKRO EKONOMI SOSIAL.

4.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

4.1.1. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) JAWA TIMUR

TAHUN 2007 - 2011

Penduduk Jawa Timur dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu Penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Untuk lebih jelasnya agar mengacu pada pokok bahasan, maka penduduk bukan usia kerja untuk sementara waktu dikesampingkan dahulu. Penduduk usia kerja (15 tahun keatas) dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu sendiri dibagi lagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu Bekerja dan Pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu sekolah, mengurus rumahtangga dan kegiatan lainnya. Kategori Bekerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang sedang aktif bekerja dan penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja tetapi untuk sementara waktu tidak bekerja (sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja). Sementara yang menjadi pokok bahasan dikategorikan sebagai Pengangguran terbuka adalah orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumahtangga, sehingga hanya orang yang termasuk Angkatan Kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka suatu wilayah itu sendiri dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persen.

TABEL 4.160
Indikator Ketenagakerjaan Di Jawa Timur,
Bulan Agustus 2007 - Agustus 2011

Kegiatan Utama	2007	2008	2009	2010	2011
1. Angkatan Kerja (jutaan)	20,12	20,18	20.338.568	19.527.051	19.761.886
2. Bekerja (jutaan)	18,75	18,88	19.305.056	18.698.108	18.940.340
3. Penganggur (jutaan)	1,37	1,30	1.033.512	828.943	821.546
4. TPAK (%)	68,99	69,32	69,25	69,08	69,49
5. TPT (%)	6,79	6,42	5,08	4,25	4,16

Sumber :Hasil Sakenas 2007 – 2011, BPS Provinsi Jawa Timur

Dari Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan pada triwulan ketiga tahun 2011, menunjukkan jumlah angkatan kerja sebesar 19, 76 juta orang, atau bertambah sekitar 0,23 juta orang dibanding angkatan kerja pada agustus tahun 2010 sebesar 19,53 juta orang. Sementara jumlah penduduk yang bekerja di periode yang sama mencapai 18,94 juta orang atau bertambah sekitar 0,24 juta orang dibanding keadaan tahun sebelumnya sebesar 18,70 juta orang. Dari angka diatas diperoleh nilai TPT di Jawa Timur pada triwulan ketiga tahun 2011 mencapai 4,16 persen, atau mengalami penurunan sebesar 0,09 point persen dibanding nilai TPT agustus tahun 2010 yaitu sebesar 4,25 persen. Seiring dengan menurunnya TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di periode yang sama mengalami kenaikan 0,41 point persen dibanding TPAK bulan agustus 2010 yang mencapai 69,08 persen menjadi 69,49 persen. Data tersebut diatas memberi gambaran bahwa terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja yang diiringi dengan menurunnya tingkat pengangguran. Hal ini berarti situasi ketenagakerjaan di Jawa Timur relatif membaik dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Selanjutnya penduduk usia kerja yang

termasuk kategori bukan angkatan kerja adalah mereka yang sebagian besar waktunya digunakan untuk kegiatan sekolah atau mengurus rumahtangga atau kegiatan lainnya seperti kegiatan organisasi sosial, keagamaan, olahraga dan lainnya. Dari data yang ditunjukkan pada tabel 4.154 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2011 mengalami penurunan sekitar 0,064 juta orang dibandingkan tahun 2010 yaitu dari 8,742 juta orang tahun 2010 menjadi 8,678 juta orang pada tahun 2011. Penurunan jumlah bukan angkatan kerja terjadi pada kelompok kegiatan mengurus rumahtangga dan kegiatan lainnya. Peningkatan jumlah penduduk pada kelompok kegiatan sekolah tentunya memberikan warna positif bagi penyiapan kualitas ketenagakerjaan di Jawa Timur dimasa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan upaya yang signifikan dalam menyiapkan SDM tersebut sejak dini sehingga menjadi tenaga kerja yang siap masuk dalam pasar kerja khusus-nya sebagai pekerja mandiri. Sementara tingginya kelompok penduduk usia kerja yang termasuk dalam kegiatan mengurus rumahtangga, dimungkinkan karena sebagian dari mereka merasa sulit untuk diterima pada pasar kerja karena keterbatasan pendidikan/ketrampilan atau kepemilikan modal untuk melakukan kegiatan usaha. Hal ini tentunya juga perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah, pelaku ekonomi dan masyarakat dalam memberikan kesempatan atau peluang kerja bagi kelompok tersebut sehingga mampu meningkatkan ekonomi dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya.

TABEL 4.161
Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja
di Jawa Timur Tahun 2010 - 2011

Bukan Angkatan Kerja	2010 *	2011
1. Sekolah	1.885.898	1.944.007
2. Mengurus Rumah tangga	5.437.150	5.381.202
3. Lainnya	1.418.726	1.353.058
Jumlah	8.741.774	8.678.257

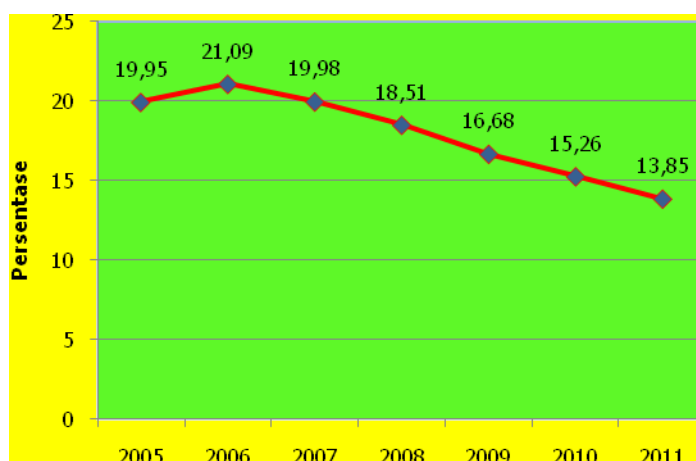
Sumber : Hasil Sakenas 2010 – 2011, BPS Provinsi Jawa Timur

* Angka diperbaiki

4.1.2. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK DI JAWA TIMUR TAHUN 2007-2011

Proses
pembangunan
merupakan
proses
transformasi
masyarakat
secara
keseluruhan
untuk mampu
memenuhi
kebutuhan
hidup sejalan

Gambar 22
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur
Tahun 2005-2011



Sumber: BPS RI

dengan proses transformasi ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh proses pembangunan itu sendiri (Basukianto, 1995). Pembangunan dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan baik secara absolut maupun relatif. Oleh karena itu kemiskinan secara integral merupakan bagian dari pembangunan.

Selama kurun waktu 7 tahun terakhir, perkembangan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2006. Angka kemiskinan pada tahun 2011 sebesar 13,85 persen dan angka ini sudah mencapai angka yang ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (15,0-15,5 persen). Pada tahun sebelumnya (2010) penduduk miskin berjumlah 5,53 juta atau sebesar 15,26 persen dari total penduduk di Jawa Timur. Selama kurun waktu setahun, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 1,03 persen poin. Pada gambar 3.1, penurunan poin persentase penduduk miskin semakin melandai atau percepatan semakin menurun daripada tahun sebelumnya kecuali tahun 2006.

Selama tahun 2010, pemerintah telah melakukan berbagai program anti kemiskinan. Program tersebut ditujukan mengurangi angka kemiskinan dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program tersebut diantaranya lomba karya penanggulangan kemiskinan (PRO POOR AWARD), pengembangan ekonomi kawasan dan pengembangan pasar desa; pengembangan usaha ekonomi desa, dan jalan lain menuju kesejahteraan rakyat (Jalinkesra).

4.1.3. PERTUMBUHAN EKONOMI ADHK TAHUN 2000 JAWA TIMUR TAHUN 2007-2011.

Pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat perolehan besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000. Pada tahun 2007 PDRB

Jawa Timur sebesar Rp. 536,98 triliun, meningkat menjadi Rp. 621,39 triliun (2008), Rp. 686,85 triliun (2009), Rp. 778,56 triliun (2010), dan Rp. 884,14 triliun (2011). Nilai PDRB yang dihasilkan tersebut masih mengandung pengaruh perubahan harga, sehingga belum bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan 2000, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah nilai produk barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil).

Berdasarkan Tabel ... dibawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh 6,11 persen, kemudian menurun pertumbuhannya menjadi 5,94 persen pada tahun 2008, dan melambat lagi pada tahun 2009 menjadi 5,01 persen, kemudian pada tahun 2010 dan tahun 2011 masing mengalami pertumbuhan sebesar 6,68 persen dan 7,22 persen.

Tabel 4.162
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
Tahun 2007 – 2011

Keterangan		2007	2008	2009	2010^{*)}	2011^{**)}
1.	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	536.982	621.392	686.848	778.566	884.144
2.	PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah)	288.404	305.539	320.861	342.281	366.984
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,11	5,94	5,01	6,68	7,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

*Keterangan : *) Angka Diperbaiki*

***) Angka Sementara*

Membaiknya kondisi ekonomi Jawa Timur tidak bertahan lama, karena pada akhir tahun 2007 hingga kuartal kedua tahun 2008, kenaikan harga minyak dunia meningkat hingga mencapai 147 dollar AS

per barrel. Secara perlahan, kenaikan itu juga berdampak pada kenaikan harga BBM di dalam negeri yang pada akhirnya mendorong naiknya harga barang dan jasa. Kondisi ini terus berlanjut dengan terjadinya krisis finansial yang dimulai dari kasus subprime mortgage di Amerika Serikat, hingga meluas di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Bagi efek domino, Jawa Timur juga terkena imbas, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 melambat kembali dan hanya mencapai 5,94 persen.

Dampak Krisis Keuangan Global yang terjadi pada akhir tahun 2008 terus berlanjut hingga tahun 2009, ekspor beberapa komoditi unggulan Jawa Timur khususnya ke negara-negara Amerika dan Eropa ikut merosot, dan berakibat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2009 terus melambat dengan hanya tumbuh sebesar 5,01 persen.

Memasuki tahun 2010, perekonomian Jawa Timur mulai menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, sebagai dampak dari mulai membaiknya perekonomian global khususnya di wilayah Asia yang mendorong naiknya ekspor Jawa Timur, baik ke luar negeri atau ke luar daerah. Dengan kondisi yang kondusif tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi masing-masing sebesar 6,68 persen dan 7,22 persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

4.1.4. Pertumbuhan Sektoral

Dampak kenaikan harga BBM pada tahun 2005-2006 mulai berkurang pada tahun 2007, sehingga perekonomian Jawa Timur mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 6,11 persen. Sektor listrik, gas, dan air bersih tercatat mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 13,70 persen, diikuti sektor pertambangan dan penggalan,

sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran masing-masing sebesar 10,35 persen, 8,40 persen dan 8,39 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian yang masih menjadi penyumbang terbesar kedua dan ketiga dalam perekonomian Jawa Timur hanya mampu tumbuh 4,77 persen dan 3,14 persen.

Tabel 4.163
Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2007-2011 (persen)

Sektor		2007	2008	2009	2010^{*)}	2011^{**)}
1.	Pertanian	3,14	3,12	3,92	2,23	2,53
2.	Pertambangan & Penggalan	10,35	9,31	6,92	9,18	6,08
3.	Industri Pengolahan	4,77	4,36	2,80	4,32	6,06
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	13,70	3,00	2,72	6,43	6,25
5.	Konstruksi	1,21	2,71	4,25	6,64	9,12
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	8,39	8,07	5,58	10,67	9,81
7.	Pengangkutan & Komunikasi	7,83	8,98	12,98	10,07	11,44
8.	Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	8,40	8,05	5,30	7,27	8,18
9.	Jasa-jasa	5,77	6,32	5,76	4,34	5,08
PDRB		6,11	5,94	5,01	6,68	7,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : *) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

Krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008 nampaknya berpengaruh pada perekonomian Jawa Timur yaitu menurunnya kegiatan ekspor impor dan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan. Tercatat tiga sektor besar yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor-sektor yang masih mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor pertambangan

dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan masing-masing tumbuh sebesar 9,31 persen, 8,98 persen, 8,07 persen, dan 8,05 persen.

Pada tahun 2009 perekonomian Jawa Timur hanya mampu tumbuh sebesar 5,01 persen, karena dampak krisis ekonomi masih berlanjut. Beberapa ekspor andalan Jawa Timur keluar negeri merosot tajam. Namun demikian, tercatat beberapa sektor masih mengalami pertumbuhan tinggi, yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa masing-masing tumbuh sebesar 12,98 persen, 6,92 persen, dan 5,76 persen. Sektor-sektor andalan Jawa Timur seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian masing-masing hanya tumbuh sebesar 5,58 persen, 2,80 persen dan 3,92 persen. Sementara sektor lainnya rata-rata masih tumbuh pada level 2 sampai 4 persen.

Memasuki tahun 2010, perekonomian Jawa Timur membaik seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global khususnya kawasan Asia, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 6,68 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini terutama didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 10,67 persen. Membaiknya kondisi perekonomian global memberi dampak terhadap membaiknya daya beli masyarakat yang mendorong sektor perdagangan, baik perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar wilayah. Sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 10,07 persen; 9,18 persen, dan 7,27 persen. Sementara itu, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian tumbuh

masing-masing sebesar 4,35 persen dan 2,13 persen. Situasi dan kondisi perekonomian yang cukup kondusif tersebut juga berkelanjutan di tahun 2011, sehingga Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 7,22 persen.

4.1.5. Distribusi PDRB Menurut Penggunaan

Tidak berbeda dengan nilai PDRB Sektoral, untuk sementara dari hasil penghitungan nilai total PDRB menurut penggunaan tahun 2011 mencapai Rp. 884,14 triliun. Jika dilihat per-komponen, strukturnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Komponen konsumsi rumah tangga selalu berada pada urutan pertama dengan capaian sebesar 67,46 persen atau sekitar Rp. 596,41 triliun dengan rincian konsumsi makanan Rp. 338,07 triliun sedangkan konsumsi non makanan mencapai Rp. 258,34 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kondisi ini lebih tinggi karena pada tahun 2010 capaiannya hanya sekitar 66,35 persen dengan komposisi untuk konsumsi makanan sebesar 38,10 persen dan untuk non makanan 28,25 persen.

PDRB Penggunaan terbagi dalam tujuh komponen. Salah satu komponen dengan urutan terbesar kedua yang membentuk PDRB Penggunaan adalah ekspor dan impor. Transaksi ekspor menggambarkan berbagai macam produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik tetapi dikonsumsi oleh pihak negara dan propinsi lain. Sementara impor menggambarkan tentang adanya tambahan penyediaan produk (*supply*) di wilayah ekonomi domestik. Impor juga terdiri dari berbagai macam produk barang dan jasa. Tidak berbeda jauh dengan ekspor, impor barang dan jasa juga berasal dari produk luar negeri maupun provinsi lain. Impor bukan merupakan produk yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi domestik, oleh karena itu impor harus dikeluarkan dari perhitungan PDRB. Dengan demikian,

maka PDRB akan menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh Jawa Timur.

Nilai ekspor pada tahun 2011 mengalami peningkatan sejalan dengan semakin bertambahnya permintaan pasar luar negeri terhadap produk-produk barang maupun jasa yang ada di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 2011 kontribusinya mencapai 49,76 persen atau sekitar Rp. 439,97 triliun, sedangkan pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 48,19 persen atau Rp. 375,18 triliun. Sementara untuk perkembangan yang terjadi pada transaksi impor memperlihatkan semakin kuatnya ketergantungan Jawa Timur terhadap produk-produk dari negara dan provinsi lain. Pada tahun 2011 kontribusi impor mencapai 45,85 persen atau sekitar Rp. 405,40 triliun, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 43,69 persen atau Rp. 340,14 triliun. Tingginya peran ekspor dan impor dalam perekonomian Jawa Timur dimungkinkan Provinsi Jawa Timur merupakan pusat industri dan perdagangan di kawasan wilayah Indonesia Timur.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan inventori merupakan variabel yang bisa digunakan untuk menghitung besarnya investasi yang ditanam. Pada tahun 2011 investasi yang terserap di Jawa Timur tercatat sebesar Rp. 174,31 triliun (19,71 persen dari total PDRB) dan perubahan inventori sebesar Rp. 5,79 triliun (0,66 persen). Investasi berguna untuk memompa kapasitas dari unit kegiatan ekonomi yang belum terpakai secara optimal.

Komponen konsumsi akhir pemerintah mencakup berbagai pengeluaran pemerintah baik dari hasil produksi domestik maupun impor. Tahun 2011 konsumsi akhir pemerintah mencapai Rp. 67,27 triliun, artinya dari total PDRB Jawa Timur sebesar 7,61 persen digunakan untuk konsumsi pemerintah. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah mencapai 7,54 persen atau sebesar Rp. 58,68 triliun. Sebagai regulator, yang utama bukan dilihat dari besarnya dana yang dikonsumsi pemerintah, justru

yang lebih penting adalah seberapa efisien dana tersebut mendorong perekonomian di Jawa Timur.

Tabel 4.164
Distribusi PDRB Jawa Timur Menurut Penggunaan ADHB dan ADHK 2000
Tahun 2007 - 2011 (Persen)

No.	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
I.	Atas Dasar Harga Berlaku					
1.0	Konsumsi Rumah tangga	67,38	65,80	67,50	66,35	67,46
	- Makanan	39,94	39,01	39,34	38,10	38,24
	- Non Makanan	27,44	26,79	28,15	28,25	29,22
2.0	Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	0,68	0,64	0,63	0,60	0,65
3.0	Konsumsi Pemerintah	7,29	7,45	7,85	7,54	7,61
4.0	Pembentukan Modal Tetap Bruto	17,61	17,78	17,86	18,65	19,71
5.0	Perubahan Inventori	3,08	3,46	1,63	2,36	0,66
6.0	Ekspor	44,63	44,25	46,23	48,19	49,76
	a. Antar Negara/Luar Negeri	19,61	19,85	21,04	21,76	22,68
	b. Antar Provinsi	25,03	24,39	25,19	26,43	27,09
7.0	Impor	40,68	39,38	41,69	43,69	45,85
	a. Antar Negara/Luar Negeri	17,69	17,33	17,77	20,00	22,24
	b. Antar Provinsi	22,99	22,05	23,92	23,69	23,61
8.0	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II.	Atas Dasar Harga Konstan 2000					
1.0	Konsumsi Rumah tangga	70,47	69,60	71,48	70,36	70,33
	- Makanan	39,95	39,27	39,72	39,11	38,82
	- Non Makanan	30,52	30,34	31,76	31,25	31,50
2.0	Konsumsi Lembaga Swasta Tidak Mencari Untung	0,67	0,64	0,64	0,65	0,65
3.0	Konsumsi Pemerintah	6,47	6,81	7,29	7,61	7,16
4.0	Pembentukan Modal Tetap Bruto	17,92	17,90	17,94	18,01	18,73
5.0	Perubahan Inventori	2,81	2,30	1,32	2,49	0,68

6.0	Ekspor	50,13	50,09	46,28	47,33	49,05
	a. Antar Negara/Luar Negeri	21,74	22,40	23,10	23,48	24,49
	b. Antar Provinsi	28,39	27,70	23,18	23,85	24,56
7.0	Impor	48,46	47,36	44,94	46,45	46,60
	a. Antar Negara/Luar Negeri	20,81	20,55	20,89	21,99	22,43
	b. Antar Provinsi	27,66	26,81	24,05	24,46	24,17
8.0	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

4.1.6. INDEKS DISPARITAS WILAYAH JAWA TIMUR TAHUN 2007-2011

Dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, masing-masing Pemerintah Daerah berupaya memacu kegiatan ekonomi di seluruh sektor. Hasil kegiatan ekonomi tersebut diharapkan nantinya terjadi pertumbuhan ekonomi (atau yang disebut program *pro growth*), dan selanjutnya dapat menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat (*pro job*). Melalui kesempatan kerja itu diharapkan dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat dengan bertambahnya pendapatan mereka sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, tidak terkecuali bertambahnya pendapatan pada masyarakat yang bergolongan pendapatan rendah (*pro poor*). Tetapi paradoks muncul, saat dikatakan pembangunan di daerah adalah salah satu yang mengakibatkan ketimpangan antar daerah. Kondisi ini muncul karena karakteristik, volume kegiatan dan percepatan perekonomian antar daerah berbeda-beda, dan sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasana masing-masing daerah. Untuk daerah maju yang mempunyai sarana dan prasana cukup lengkap seperti Surabaya, lebih dominan dijadikan sebagai daerah tujuan usaha (mengadu nasib) bagi para pelaku ekonomi. Wajar, jika Surabaya yang mempunyai wilayah relatif sempit, memancing arus urban dan mempunyai PDRB yang terbesar dibanding daerah lain di Jawa Timur. Jika daerah lain tidak

berbenah diri, maka kecepatan pembangunan di daerah itu akan semakin tertinggal dan kesenjangan ekonomi antar wilayah atau yang dikenal sebagai disparitas antar wilayah akan semakin menganga.

Untuk menyempitkan disparitas disparitas antar wilayah ini perlu kerja keras, inisiatif dan kreatifitas Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang ada untuk meningkatkan ekonominya. Sebagai contoh, Kabupaten Lamongan dengan WBL (Wisata Bahari Lamongan)-nya mampu menyulap daerah itu menjadi lebih dinamis sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tidak hanya di sektor pariwisata tetapi juga sektor lainnya seperti konstruksi (real estate) dan perdagangan.

Terdapat beberapa cara untuk mengetahui disparitas antar wilayah secara statistik, di sini penghitungannya ditunjukkan oleh indeks

Tabel 4.165
Indeks Williamson Jawa Timur
Tahun 2007-2011

Tahun	Indeks Williamson	Perubahan
2007	115,34	-0,45741
2008	115,26	-0,06936
2009	115,85	0,51189
2010	115,14	-0,61286
2011**)	112,53	-2,26680

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan: **) Angka Sangat Sementara

disparitas Williamson yang merupakan varians sederhana dari pendapatan per kapita masing-masing wilayah. Semakin besar angka ini berarti semakin melebar kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil indeks ini, semakin mengecil kesenjangan antar wilayahnya.

Cukup menggembirakan selama periode lima tahun terakhir (2007–2011) indeks Williamson mengalami fluktuatif namun terdapat kecenderungan menurun. Indeks Williamson pada tahun 2007 bernilai 115,34 atau terjadi penurunan sebesar -0,46 persen dibanding tahun sebelumnya. Isu dampak dari kenaikan harga BBM mulai 24 Mei 2008 serta terjadi krisis global sempat menjadi penyebab terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2007. Tetapi perlambatan ekonomi pada tahun 2008 itu belum begitu terasa, karena

tingkat kesenjangan di Jawa Timur yang ditunjukkan dengan nilai indeks Williamson yang mengalami penurunan sebesar -0,07 persen atau mempunyai indeks 115,26.

Justru dampak dari kenaikan BBM dan krisis finansial khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika yang dikenal sebagai subprime mortgage lebih terasa pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi melambat dari 5,94 persen pada tahun 2008 menjadi 5,01 persen pada tahun 2009, dan indeks Williamson juga melebar dari 115,26 pada tahun 2008 menjadi 115,85 atau mengalami pelebaran sebesar 0,51 persen. Beruntungnya, dampak dari krisis finansial tersebut tidak berlanjut pada tahun 2010. Selain karena sudah berpengalaman dalam menghadapi situasi krisis sebagaimana yang terjadi pada tahun 1998, fundamental ekonomi dalam negeri jauh lebih baik dibanding tahun 1998, maka Jawa Timur kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Apalagi Jawa Timur sangat mengandalkan sektor riil, dan berbeda struktur perekonomiannya dibanding Jakarta yang sangat mengandalkan sektor perbankan yang notabene sangat rentan terhadap krisis finansial. Kondisi tersebut menyebabkan Jawa Timur mampu tumbuh pada tahun 2010 sebesar 6,68 persen dan indeks Williamson menurun menjadi 115,14 atau terjadi penurunan -0,61 persen dibanding tahun 2009.

Kegiatan ekonomi di Jawa Timur yang cukup dinamis kembali berlanjut pada tahun 2011. Di tengah-tengah isu dampak dari isu utang Amerika dan Eropa dan kekhawatiran dampak ekspor impor pasca Tsunami Jepang, Jawa Timur mampu tumbuh pada tahun 2011 sebesar 7,22 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diikuti oleh penyempitan disparitas wilayah. Pada tahun 2011 indeks Williamson tercatat sebesar 112,53 atau terjadi penyempitan kesenjangan sebesar -2,27 persen. Menurunnya kesenjangan ini disebabkan oleh peran kinerja ekonomi makro masing-masing daerah yang semakin membaik. Bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 cukup berkualitas, selain terjadi

penurunan TPT dan penduduk miskin, tetapi juga diikuti oleh menyempitnya kesenjangan antar wilayah di Jawa Timur.

4.1.7. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA JAWA TIMUR

TAHUN 2007-2011

a) Status Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia, dan juga untuk melihat seberapa jauh pertumbuhan ekonomi berdampak pada pembangunan manusia. Dengan mengevaluasi angka IPM, keterbandingan/posisi pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Jawa Timur dapat diketahui baik dari angka IPMnya sendiri maupun dari tiga komponen pembentuknya (indikator kesehatan, indikator pendidikan dan indikator daya beli). Kontribusi ketiga komponen IPM tersebut juga diperlukan untuk menetapkan prioritas program pembangunan. Data IPM menjadi sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah.

Selama periode 2007-2011 angka IPM di Jawa Timur secara umum menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2007 nilainya 69,78, dan selanjutnya meningkat terus menjadi 70,38 (2008); 71,06 (2009); 71,62 (2010) dan pada tahun 2011 mencapai 72,15. Dari hasil penghitungan IPM tahun 2011, diperoleh gambaran bahwa 19 Kabupaten/Kota mempunyai IPM lebih tinggi daripada IPM Jawa Timur, sedangkan 19 kabupaten lainnya memiliki nilai IPM lebih rendah daripada angka IPM Jawa Timur. Nilai IPM tertinggi dicapai oleh Kota Blitar sebesar 77,89 sedangkan urutan kedua ditempati Kota Surabaya dengan angka IPM 77,87 dan urutan ketiga adalah Kota Malang sebesar

77,83. Urutan terendah IPM adalah Kabupaten Sampang dengan nilai 60,49, namun angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang hanya sebesar 59,70.

Tabel 4.166
Perkembangan Angka IPM Selama di Jawa Timur, Tahun 2007-2011

No.	Tahun	IPM	Angka IPM Tertinggi	Angka IPM Terendah	Jml. Kab dengan IPM di bawah rata-rata Jatim	Jml. Kab dengan IPM di atas rata-rata Jatim
1.	2007	69,78	75,88	56,99	19	19
2.	2008	70,38	76,60	57,66	19	19
3.	2009	71,06	76,98	58,68	19	19
4.	2010*	71,62	77,42	59,70	19	19
5.	2011**	72,15	77,89	60,49	19	19

Sumber : BPS RI

Keterangan : *) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

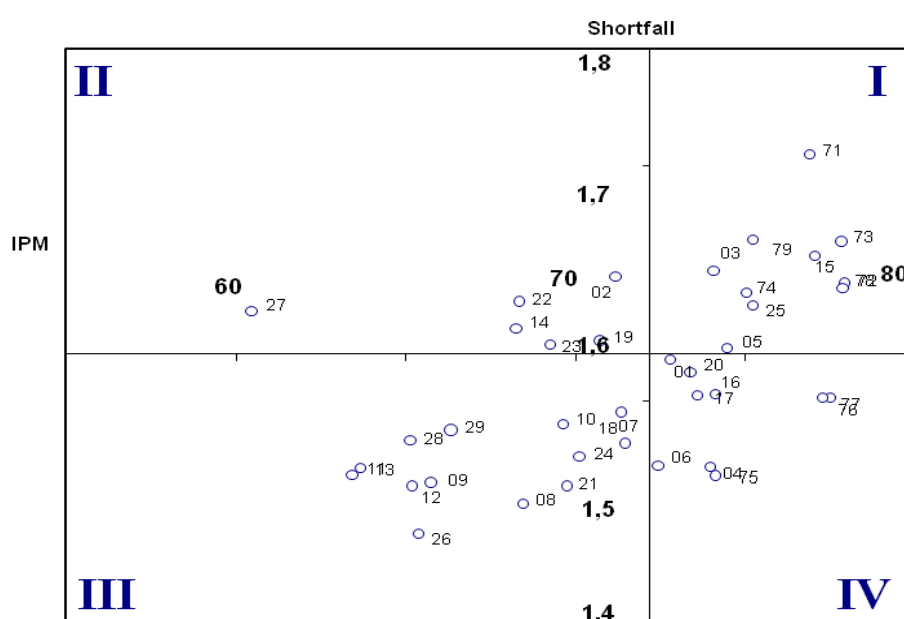
Pada periode lima tahun terakhir, IPM kabupaten/kota mengalami kenaikan walaupun tidak menunjukkan kenaikan yang drastis. Hal ini tidak terlepas dari adanya berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan angka IPM, seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana tersebut.

b) Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia

Reduksi *shortfall* per tahun digunakan untuk mengukur kecepatan peningkatan pencapaian pembangunan manusia per

tahun, dimana selama periode 2007-2011 besaran reduksi *shortfall* adalah 1,67. Gambar 23 menunjukkan posisi masing-masing kabupaten/kota yang berkaitan dengan pencapaian pembangunan manusia, dicerminkan oleh besaran IPM dan reduksi *shortfall* per tahun yang dibandingkan dengan reduksi *shortfall* Provinsi Jawa Timur.

Gambar 23
Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Berdasarkan IPM Tahun 2011 dan Reduksi Shortfall Tahun 2007-2011



Kabupaten					Kota	
01 Pacitan	11 Bondowoso	21 Ngawi	71 Kediri			
02 Ponorogo	12 Situbondo	22 Bojonegoro	72 Blitar			
03 Trenggalek	13 Probolinggo	23 Tuban	73 Malang			
04 Tulungagung	14 Pasuruan	24 Lamongan	74 Probolinggo			
05 Blitar	15 Sidoarjo	25 Gresik	75 Pasuruan			
06 Kediri	16 Mojokerto	26 Bangkalan	76 Mojokerto			
07 Malang	17 Jombang	27 Sampang	77 Madiun			
08 Lumajang	18 Nganjuk	28 Pamekasan	78 Surabaya			
09 Jember	19 Madiun	29 Sumenep	79 Batu			
10 Banyuwangi	20 Magetan					

Sumber : BPS RI

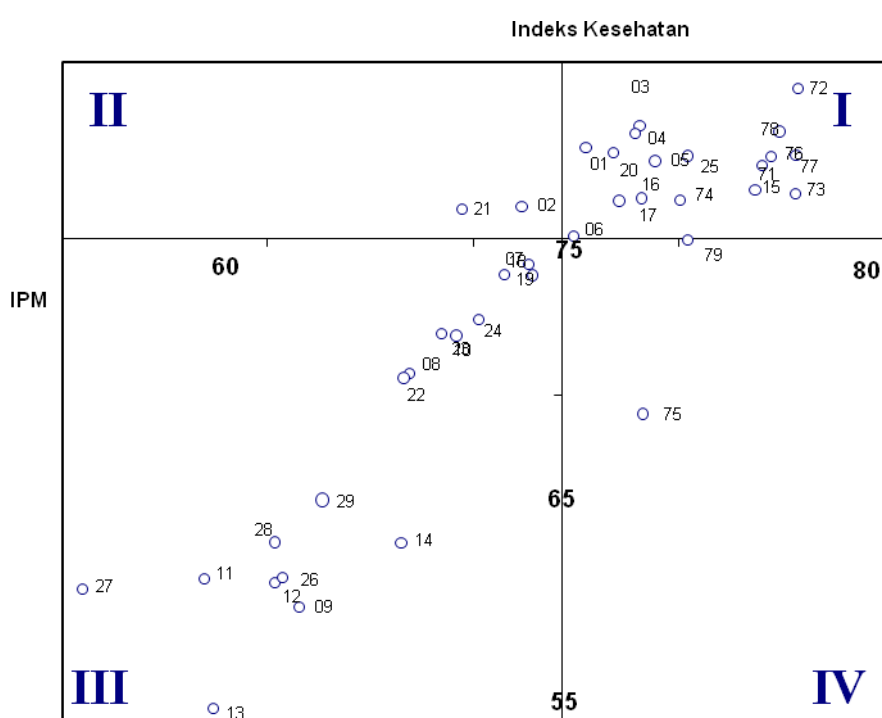
Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, terdapat 9 kabupaten/kota yang memiliki reduksi *shortfall* dan angka IPM yang lebih tinggi dari angka IPM Jawa Timur. Kemudian pada kuadran II hanya terdapat 5 kabupaten/kota yang memiliki *shortfall* lebih tinggi dari *shortfall* Jawa Timur tetapi mempunyai IPM yang lebih rendah daripada Jawa Timur. Sedangkan 14 kabupaten/kota yang memiliki reduksi *shortfall* lebih rendah dan IPM yang lebih rendah daripada Jawa Timur berada di kuadran III. Kabupaten/kota yang berada di kuadran IV atau memiliki IPM lebih tinggi dari Jawa Timur tetapi mempunyai reduksi *shortfall* rendah sebanyak 10 daerah. Daerah yang memiliki *shortfall* terendah adalah Kabupaten Bangkalan (1,59), sedangkan yang mempunyai shortfall paling bagus adalah Kota Kediri (1,76).

Gambar 24, Gambar 25 dan Gambar 26 menunjukkan posisi masing-masing kabupaten/kota berdasarkan angka IPM dengan tiga komponennya (indikator kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan). Gambar tersebut diharapkan dapat memudahkan pengambilan kebijakan dalam menentukan prioritas sasaran program guna percepatan peningkatan angka IPM pada masing-masing wilayah di masa mendatang.

Dari penghitungan IPM berdasar indeks kesehatan yang dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, angka tertinggi berhasil dicapai Kota Blitar yaitu sebesar 79,19 dan angka terendah sebesar 60,60 dicapai oleh Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 17 kabupaten/kota berada pada kuadran I yang memiliki nilai IPM dan indeks kesehatan yang lebih tinggi dari angka Jawa Timur. Hanya 2 kabupaten yang menempati kuadran II yaitu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Ngawi. Pada kuadran III terdapat 17 kabupaten yang memiliki nilai IPM dan indeks kesehatan yang lebih rendah daripada angka Jawa Timur, termasuk di dalamnya sebagian daerah tapal kuda. Kuadran IV ditempati oleh Kota Pasuruan dan Kota Batu.

Dalam usaha meningkatkan nilai indeks kesehatan ini, pemerintah daerah perlu memperhatikan daerah yang memiliki indeks kesehatan yang masih rendah, antara lain dengan mengupayakan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan pembangunan sarana kesehatan yang memadai.

Gambar 24
Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Berdasarkan IPM dan Indeks Kesehatan Tahun 2011

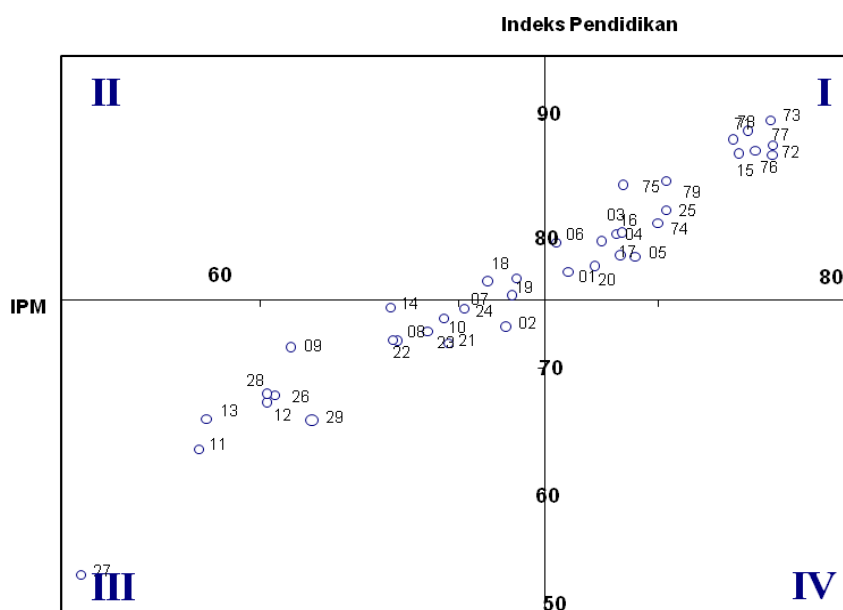


Kabupaten				Kota	
01	Pacitan	11	Bondowoso	21	Ngawi
02	Ponorogo	12	Situbondo	22	Bojonegoro
03	Trenggalek	13	Probolinggo	23	Tuban
04	Tulungagung	14	Pasuruan	24	Lamongan
05	Blitar	15	Sidoarjo	25	Gresik
06	Kediri	16	Mojokerto	26	Bangkalan
07	Malang	17	Jombang	27	Sampang
08	Lumajang	18	Nganjuk	28	Pamekasan
09	Jember	19	Madiun	29	Sumenep
10	Banyuwangi	20	Magetan		
				71	Kediri
				72	Blitar
				73	Malang
				74	Probolinggo
				75	Pasuruan
				76	Mojokerto
				77	Madiun
				78	Surabaya
				79	Batu

Sumber : BPS RI

Dalam perspektif peningkatan derajat kesehatan, dimana komponen indeks kesehatan pada penghitungan IPM dicerminkan oleh besaran angka harapan hidup, untuk memaksimalkan peningkatan angka harapan hidup maka upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan harus terus menjadi prioritas. Beberapa faktor yang cukup sensitif terhadap perubahan angka kematian bayi dan ibu seperti pola makanan yang bergizi dan penolong kelahiran/persalinan, perlu mendapat

Gambar 25
Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Berdasarkan IPM dan Indeks Pendidikan Tahun 2011



Kabupaten				Kota	
01 Pacitan	11 Bondowoso	21 Ngawi	71 Kediri		
02 Ponorogo	12 Situbondo	22 Bojonegoro	72 Blitar		
03 Trenggalek	13 Probolinggo	23 Tuban	73 Malang		
04 Tulungagung	14 Pasuruan	24 Lamongan	74 Probolinggo		
05 Blitar	15 Sidoarjo	25 Gresik	75 Pasuruan		
06 Kediri	16 Mojokerto	26 Bangkalan	76 Mojokerto		
07 Malang	17 Jombang	27 Sampang	77 Madiun		
08 Lumajang	18 Nganjuk	28 Pamekasan	78 Surabaya		
09 Jember	19 Madiun	29 Sumenep	79 Batu		
10 Banyuwangi	20 Magetan				

Sumber : BPS RI

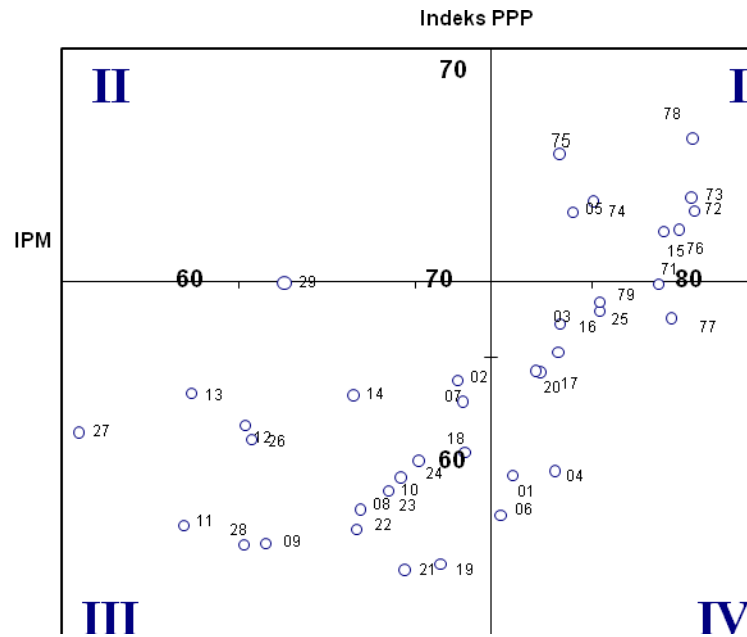
Dari penghitungan komponen kedua pendukung IPM yaitu indeks pendidikan, pada tahun 2011 tercatat tertinggi dicapai Kota Malang sedangkan nilai terendah dicapai Kabupaten Sampang dengan nilai masing-masing sebesar 89,87 dan 53,52. Dari Gambar 3.4, kuadran I ditempati 19 kabupaten/kota yang mencakup seluruh wilayah kota. Pada kuadran II terdapat 3 kabupaten/kota yang memiliki IPM lebih rendah dari Jawa Timur, tetapi mempunyai indeks pendidikan yang lebih tinggi dari indeks Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun. Sebanyak 16 Kabupaten berada di kuadran III dan tidak ada kabupaten/kota yang menempati kuadran IV. Dari hasil penghitungan indeks kesehatan dan indeks pendidikan, dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah dengan indeks kesehatan rendah juga merupakan daerah yang memiliki indeks pendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan teori yang ada yaitu semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki di suatu wilayah maka tingkat kesehatan masyarakatpun juga semakin rendah.

Dari gambar 3.3 dan 3.4 terlihat bahwa indeks kesehatan dan pendidikan penduduk yang tinggal di sebagian besar wilayah tapal kuda relatif rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur. Kondisi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rendahnya nilai pembangunan manusia di wilayah tapal kuda. Rendahnya kedua komponen tersebut, diduga karena pengaruh kultur yang cukup melekat pada masyarakat terhadap kemampuan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa usaha dalam meningkatkan IPM akan mengalami kesulitan jika dilihat dari segi kesehatan maupun pendidikan, karena kedua komponen tersebut berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang tidak mudah mengalami perubahan, seperti masih banyak ditemukan rumah tangga yang lebih memilih dukun daripada tenaga medis sebagai penolong kelahiran bayi.

Komponen ketiga pendukung angka IPM yang perlu dievaluasi adalah indeks daya beli atau PPP (Purchasing Power Parity / daya beli). Variabel ini cukup berpengaruh, karena identik dengan capaian kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Kontribusi PPP ini akan tercapai seiring peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Gambar 26 menunjukkan daerah yang berada di kuadran I sebanyak 8 kabupaten/kota dengan 2 daerah di antaranya adalah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan sisanya adalah daerah perkotaan. Tidak satupun kabupaten/kota menempati kuadran II. Pada kuadran III ditempati oleh 19 kabupaten yang sebagian besar wilayahnya juga merupakan daerah tapal kuda, sedangkan pada kuadran IV terdapat 11 kabupaten. Sebaran nilai IPM dan PPP yang ditunjukkan pada Gambar 3.5, memperlihatkan bahwa nilai PPP tertinggi pada tahun 2011 dicapai oleh Kota Surabaya sebesar 68,54 sedangkan untuk PPP terendah adalah Kabupaten Ngawi sebesar 61,55.

Selama periode tahun 2007-2011 ini indeks daya beli kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami perbaikan meskipun mengalami beberapa kendala akibat faktor intern dan ekstern. Seiring menggeliatnya ekonomi di daerah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat pada tahun 2011 seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan, sehingga mampu mendongkrak IPM.

Gambar 26
Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Berdasarkan IPM dan Indeks PPP Tahun 2011



Kabupaten				Kota	
01	Pacitan	11	Bondowoso	21	Ngawi
02	Ponorogo	12	Situbondo	22	Bojonegoro
03	Trenggalek	13	Probolinggo	23	Tuban
04	Tulungagung	14	Pasuruan	24	Lamongan
05	Blitar	15	Sidoarjo	25	Gresik
06	Kediri	16	Mojokerto	26	Bangkalan
07	Malang	17	Jombang	27	Sampang
08	Lumajang	18	Nganjuk	28	Pamekasan
09	Jember	19	Madiun	29	Sumenep
10	Banyuwangi	20	Magetan	71	Kediri
				72	Blitar
				73	Malang
				74	Probolinggo
				75	Pasuruan
				76	Mojokerto
				77	Madiun
				78	Surabaya
				79	Batu

Sumber : BPS RI